BAB III

PERAN UNI EROPA DALAM PENGUATAN LEMBAGA DEMOKRASI

Dalam BAB ini akan mengupas tentang peran Uni Eropa dalam mendorong penguatan lembaga demokrasi di negara-negara kawasan Balkan Barat. Subbab mengenai bab ini *pertama* adalah mengenai peran dan upaya yang dilakukan Uni Eropa dalam mendorong penguatan lembaga demokrasi di kawasan Balkan Barat yang berada di dalam sebuah kerangka besar yaitu SAP (*Stabilization and Association Process*). Di dalam SAP (*Stabilization and Association Process*) ini terdiri mengenai SAA (*Stabilization and Association Process*) dan IPA (*Pre-Accession Instrument*). Subbab *kedua* adalah mengenai implementasi dari *Stabilization and Association Process* (SAP) di kawasan Balkan Barat.

A. PERAN UNI EROPA DALAM PENGUATAN LEMBAGA DEMOKRASI

Masa transisi demokrasi dimulai oleh negara-negara di kawasan Balkan Barat di pasca kemerdekaannya. Sistem komunisme lambat laun mulai ditinggalkan oleh negara-negara tersebut. Kondisi kawasan Balkan Barat pasca kemerdekannya penuh dengan perang sipil, *civil society* yang lemah, institusi yang lemah, politik domestik yang tidak stabil, korupsi yang sangat tinggi, administrasi publik yang lemah dan tidak berpengalaman, disfungsional institusi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, tingginya ketergantungan

terhadap asing, banyaknya pengangguran, penghormatan yang rendah terhadap hak minoritas, dll. Kondisi seperti ini sangat wajar terjadi dan terlihat di suatu kawasan yang mengalami masa transisi sistem perpolitikan, entah itu dari sistem kerajaan menuju demokrasi, dari sistem komunisme menuju demokrasi, maupun pergantian suatu sistem ke sistem lainnya. Ditambah lagi, negara-negara di kawasan Balkan Barat adalah negara yang baru merdeka. Umur negara-negara tersebut rata-rata baru menginjak 25 tahun merdeka. Itu adalah umur yang sangat muda bagi berdirinya suatu negara. Sehingga hambatan menuju demokrasi semakin tinggi, karena disamping negara-negara tersebut menyiapkan diri mereka bertransisi menjadi demokrasi, mereka juga harus mengkondisikan dan menstabilkan kondisi perpolitikan dalam negeri. Maka dalam hal ini, bantuan dan dorongan aktor eksternal untuk mengupayakan demokratisasi di kawasan Balkan Barat sangat dibutuhkan. Dalam hal ini Uni Eropa sebagai aktor eksternal mengupayakan untuk mendorong demokratisasi di kawasan Balkan Barat. Di bawah ini adalah peran dan dorongan Uni Eropa dalam membantu upaya demokratisasi di kawasan Balkan Barat di dalam bidang politik yaitu yang berada di dalam kerangka *Stabilization and Association Process* (SAP).

Dorongan yang diberikan Uni Eropa kepada negara-negara di kawasan Balkan Barat dalam kerangka SAP (*Stabilization and Association Process*) ini, dapat dikatakan sebagai sebuah rezim internasional. Hal ini dikarenakan bahwa, semua negara yang ada di kawasan Balkan Barat harus mengikuti prosedur-prosedur yang disyaratkan oleh Uni Eropa dalam upayanya menjadi negara demokrasi.

1. ***Stabilization and Association Process* (SAP)**

Stabilization and Association Process (SAP) adalah sebuah kebijakan Uni Eropa terhadap kawasan Balkan Barat untuk mempersiapkan keanggotaan negara-negara di kawasan Balkan Barat ke dalam Uni Eropa.[1] *Stabilization and Association Process* (SAP) mengatur beberapa tujuan politik dan ekonomi di kawasan tersebut, walaupun evaluasi akan program tersebut dilakukan berdasarkan kemanfaatan program di kawasan Balkan Barat.

Sebelum terdapat *Stabilization and Association Process* (SAP), Uni Eropa mengeluarkan *Stability Pact* untuk kawasan Eropa Tenggara. *Stability Pact* diadopsi dari tahun 1999-2008 dan digantikan oleh *Regional Cooperation Council* (RCC) di tahun 2008. *Stability Pact* bertujuan untuk memperkuat perdamaian, menghindari konflik dengan negara tetangga, mengurangi terjadinya perang etnis, mendorong demokrasi, HAM, dan ekonomi di negara-negara Eropa Tenggara. *Stability Pact* ini dikeluarkan karena ada peristiwa Kosovo *war*. Sebenarnya, tujuan utama dari pakta ini adalah untuk menstabilkan situasi politik-ekonomi di Kosovo. Akan tetapi, walaupun tujuan sebenarnya dari pakta ini adalah untuk menstabilkan situasi politik-ekonomi di Kosovo, pakta ini juga membangun stabilisasi dan kerjasama regional di kawasan Balkan (Albania, Kroasia, Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Bulgaria, Rumania, dan Moldova).

[1] http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/sap_en diakses pada 25 Desember 2016 pukul 19.12 WIB.

Setelah adanya *Stability Pact* ini, Uni Eropa tetap mencari cara untuk meningkatkan kerjasama regional di kawasan Balkan khususnya Balkan Barat yang tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas politik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam mencapai hal ini, Uni Eropa mengeluarkan *Stabilization and Association Process* (SAP) untuk kawasan Balkan Barat. *Stabilization and Association Process* (SAP) dapat disebut sebagai implementasi dari *Stability Pact* di kawasan Balkan Barat.

Stabilization and Association Process (SAP) adalah sebuah *long-term policy* untuk membantu kawasan Balkan Barat dalam men-*tackle* tantangan dalam reformasi institusi demokrasi, promosi perdagangan dan perkembangan ekonomi, melawan korupsi, kejahatan etnis, kemiskinan, dan *social exclusion*. Tujuan utama dari *Stabilization and Association Process* (SAP) adalah mempertahankan kestabilan institusi demokrasi, memastikan berlakunya aturan-aturan hukum, dan menopang sistem ekonomi pasar-bebas.[2] Sesungguhnya program *Stabilization and Association Process* (SAP) ini ada ketika negara-negara di kawasan Balkan Barat mendaftarkan diri mereka ke dalam keanggotaan Uni Eropa. Maka hal ini dapat disebut bahwa peran Uni Eropa ada dan dimulai ketika program ini disetujui.

Program ini diperkenalkan oleh Uni Eropa pada tahun 1999. Di tahun 2000 pada Zagreb *Summit*, Uni Eropa dan negara-negara di kawasan Balkan Barat berkomitmen pada *Stabilization and Association Process* (SAP). Terdapat 3 tahapan di dalam SAP ini yaitu pertama tahap negosiasi,

[2] Union, E, 2004, *The European Union and Western Balkans : Building the Future Together.* Europe: European Communities, hlm 7.

kemudian penandatanganan, dan implementasi. Kemudian, negosiasi dan komitmen tersebut diperkuat dalam *Thessaloniki Summit* 2003 dengan judul "*Thessaloniki Agenda for the Western Balkans: Moving towards European Integration".* Program ini adalah sebuah program khusus yang hanya dibuat dan diberikan oleh Uni Eropa bagi kawasan Balkan Barat. Selain program ini bertujuan untuk membangun keanggotaan negara-negara di kawasan Balkan Barat, program ini juga membantu mengupayakan terjadinya sistem demokrasi di kawasan Balkan Barat baik dalam sistem ekonomi maupun politik. Dalam kerangka SAP ini, Uni Eropa berperan untuk mendorong demokratisasi di kawasan Balkan Barat dalam beradaptasi dengan sistem ekonomi pasar bebas; menguatkan reformasi politik dan ekonomi; stabilitas politik; mendukung meningkatnya kerja pemerintahan dan institusi; melindungi HAM; *refugee returns;* melawan korupsi dan kejahatan terorganisir; serta menyediakan bantuan finansial dan teknis dalam melakukan perdagangan dengan negara-negara Eropa Barat.[3]

Uni Eropa tidak mendikte untuk mereformasi sistem politik disana, tetapi dia berusaha untuk menarik para pemimpin dan pembuat keputusan di negara tersebut untuk mereformasi negaranya menjadi demokratis. Uni Eropa berusaha untuk mendekati para *national actors* di Balkan Barat. Para *national actors* berperan sangat vital, karena dia dianggap mampu untuk mereformasi institusi dan sistem yang ada di negara tersebut. Di kawasan

[3] Troncota, I. G, 2013, EU's Laboratory in the Western Balkans : Experimenting Europeanization without Democratization-The Case of Bosnia and Herzegovina, *Revista Española de Ciencia Política*, hlm 70.

Balkan Barat dapat disebut bahwa Uni Eropa menjadi *leading role* dalam mengupayakan terciptanya sistem demokratisasi. Uni Eropa menggunakan *tool of enlargement* yang kuat dalam kebijakan luar negeri untuk mempengaruhi politik domestik di negara-negara tersebut.

Dalam mengeluarkan *agreement* SAP ini, sebelumnya negara-negara di kawasan Balkan Barat harus memenuhi syarat *Copenhagen Criteria* 1993. *Copenhagen Criteria* 1993 ini adalah sebuah kebijakan *enlargement* Uni Eropa terhadap negara-negara yang ingin menjadi anggota Uni Eropa. Isi dari kebijakan tersebut adalah (1) setiap negara yang ingin masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa harus mampu menciptakan stabilitas institusi yang menjamin demokrasi, penegakan hukum, HAM, dan menghormati hak-hak minoritas. (2) setiap negara yang ingin masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa harus mampu menciptakan sistem ekonomi pasar-bebas dan mampu mengatasi tekanan dan kekuatan pasar yang kompetitif di dalam Uni Eropa. (3) setiap negara yang ingin masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa harus melaksanakan kewajiban sebagai negara anggota seperti mematuhi aturan, standar, dan kebijakan bersama, serta patuh terhadap tujuan kesatuan politik, ekonomi dan moneter (*acquis communautaieres*).[4]

2. S*tabilization and Association Agreement* (SAA)

Perjanjian ini ditandatangani dan disetujui oleh *potential applicant state* dengan *European Communities* yang direpresentasikan oleh

[4] http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html diakses pada 26 Desember 2016 pukul 21.26 WIB.

Komisioner Hubungan Eksternal bersama Menteri Luar Negeri dari seluruh negara anggota Uni Eropa. *Stabilization and Association Agreement* (SAA) sebagai sebuah *introduction* mengenai nilai-nilai, prinsip, dan standar Eropa. Nilai-nilai, prinsip, dan standar Eropa tersebut meliputi demokrasi, penegakan hukum, penghormatan HAM, melindungi hak minoritas, dan mengembangkan ekonomi pasar.[5] SAA menjadi sebuah inti dan kesimpulan dari SAP. *Stabilization and Association Agreement* (SAA) sebagai sebuah *agreement* yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas dan memberikan fasilitas dalam menuju keanggotaan Uni Eropa. Isi mengenai *agreement* ini adalah :

- **Title 1 : *General Principles***

  Title 1 berisi tentang komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas, prinsip demokrasi, hak dasar, dan penegakan hukum. Setiap negara yang menandatangani SAA harus bekerjasama dengan ICTY (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*).

- **Title 2 : *Political Dialogue***

  Title 2 meliputi bahwa negara harus melakukan dialog politik di dalam sebuah forum *meeting* via *diplomatic channels*, yang sering disebut dengan *Stabilization and Association Councils*. Dialog politik ini bukan berarti sebuah komunikasi bilateral, tetapi komunikasi regional agar tercipta *good neighbourly relations.*

[5] Troncota, I. G, 2013, EU's "Laboratory" in the Western Balkans : Experimenting Europeanization without Democratization-The Case of Bosnia and Herzegovina, *Revista Española de Ciencia Política*, hlm 70.

- **Title 3 : *Regional Cooperation***

  Setiap negara yang menandatangani SAA harus berpartisipasi aktif dalam kerjasama regional, terutama harus *fully implement* CEFTA.

- **Title 4 : *Free Movement of Goods***

  Setiap negara yang menandatangani SAA harus berusaha menyesuaikan dengan ketentuan di dalam GATT 1994 dan WTO terutama di dalam bidang produk industri, pertanian, dan perikanan.

- **Title 5 : *Movement of Workers, Establishment, Supply of Services, Movement of Capital***

  Negara yang menadatangani SAA harus menerapkan non-diskriminasi dan *reciprocity* terhadap para pekerja, karena setiap pekerja memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan.

- **Title 6 : *Approximation of Laws, Law Enforcement, and Competition Rules***

  Setiap negara yang menandatangani SAA harus mengimplementasikan dan menegakkan hukum baru mengenai aturan berkompetisi, intelektual, industri dan komersial *property*, perlindungan konsumen, dan *public procurement*.

- **Title 7 : *Justice, Freedom, and Security***

Setiap negara yang menandatangani SAA harus berfokus dalam peradilan, kebebasan, dan keamanan yang meliputi tentang asilum, migrasi, melawan korupsi, *crime*, dan terorisme.

- **Title 8 : *Cooperation Policies***

  Setiap negara yang menandatangani SAA harus berusaha membangun ekonomi pasar yang berkelanjutan baik dalam bidang fiskal maupun moneter sesuai *European Economic and Monetary Union* dan mengembangkan *social development*.

- **Title 9 : *Financial Cooperation***

  Setiap negara yang menandatangani SAA berhak mendapatkan bantuan finansial dari Uni Eropa dan *European Investment Bank* (EIB).

- **Title 10 : *Institutional, General, and Final Provisions***

  Membangun *Stabilisation and Association Council* bersama *European Council* dan *European Commissions*, dimana harus dilakukan pertemuan secara reguler untuk mendiskusikan kemajuan dan evaluasi mengenai implementasi ketentuan dari SAA.

Tabel 3: Penandatanganan SAA antara Negara-negara Balkan Barat dengan Uni Eropa

	Croatia	Serbia	BaH	Montenegro*	Macedonia (FYROM)	Albania	Kosovo (UN 1244)
SAA negotiations started	2000	June 2007	Nov. 2005	Sept 2006	2000	Jan. 2003	-
SAA signed	Sept. 2001	April 2008	June 2008	Oct 2007	April 2001	June 2006	-
Interim Agreement in force		Feb. 2010	July 2008	Jan 2008	June 2001	Dec 2006	-
SAA in force	Feb. 2005	ratification started in June 2010	so far ratified by 25/27 MS	May 2010	April 2004	April 2009	-
Date of membership application	Feb. 2003	Dec. 2009	-	Dec. 2008	March 2004	April 2009	-
Candidate status	June 2004	March 2012	-	2011	Dec. 2005	-	-
Accession negotiations started	Oct. 2005	-	-	June 2012	-	-	-
Accession negotiations concluded	June 2011						

Sumber : Mostetschnig, A. M, 2011, *CEFTA and The European Single Market: an appropriate preparatory exercise?* Poland: Department of European Interdisciplinary Studies-College of Europe Natolin Campus, hlm 21.

Tabel 4: Aktor-aktor yang Berperan di dalam Penandatanganan SAA

No.	Negara	Wakil dari Uni Eropa	Wakil dari Negara Balkan Barat
1.	Albania	Olli Rehn (*Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations*)	Besnik Mustafaj (*Foreign Minister*)
2.	Bosnia-Herzegovina	Olli Rehn (*Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations*)	Nikola Špirić (*Prime Minister*)
3.	Kosovo	a. Federica Mogherini (*High Representative for Foreign Affairs and Security Policy*) b. Johannes Hahn (*Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations*)	a. Isa Mustafa (*Prime Minister*) b. Bekim Collaku (*Minister of European Integration and Chief Negotiator*)
4.	Kroasia	Christopher Francis Patten (*Commissioner for External Relations*)	Mr. Mimica (*Croatian Chief Negotiator*)

5.	Macedonia	Gunter Verheugen (*Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations*)	*Government of Macedonia*
6.	Montenegro	Olli Rehn (*Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations*)	*Government of Montenegro*
7.	Serbia	Olli Rehn (*Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations*)	*Government of Serbia*

Dalam penandatanganan SAA, Kosovo baru mengajukan proposal SAA ke Uni Eropa pada tahun 2015. *Force* SAA di Kosovo di tahun 2016 masih belum jelas. Akan tetapi, dalam hal ini Uni Eropa memberikan visa liberalisasi kepada Kosovo. *Point-point* mengenai visa liberalisasi itu adalah *pertama,* Uni Eropa mendukung institusi negara dan *civil society* dalam proses reformasi. *Kedua,* Uni Eropa memberikan gambaran atau map dalam mengkondisikan negara tersebut terhadap standar Uni Eropa.

3. *Pre-Accession Instrument* (IPA)

Salah satu upaya untuk mendorong sistem demokrasi di kawasan Balkan Barat, Uni Eropa mengadopsi *Pre-Accession Instrument* (IPA). Instrumen tersebut dikenalkan pada tahun 2006 di kawasan Balkan Barat, tetapi secara resmi instrumen ini dilakukan pada tahun 2007. *Pre-*

Accession Instrument (IPA) ini adalah sebagai bentuk dari *financial assistance* (bantuan keuangan) dan *technical assistance* di kawasan Balkan Barat.[6] *Financial assistance* ini diberikan Uni Eropa kepada institusi dan prioritas pembangunan di kawasan Balkan Barat sebagai *financial support*. Dengan adanya IPA ini, diharapkan mampu membantu reformasi ekonomi dan politik yang dilakukan oleh negara tersebut. *Pre-Accession Instrument* (IPA) ini sebagai *general framework* untuk memberikan fasilitas keuangan bagi negara kandidat dan *potential candidate countries* yang ingin masuk menjadi anggota Uni Eropa. Uni Eropa telah memberikan *economic support package* kepada kawasan Balkan Barat. Bantuan finansial yang diberikan memiliki efek besar dalam demokratisasi dalam hal mereformasi institusi.

Ada lima komponen yang terdapat di dalam *Pre-Accession Instrument* (IPA). Kelima komponen tersebut adalah (1) bantuan transisi dan pembangunan intitusi, (2) kerjasama lintas-batas, (3) pembangunan regional, (4) pembangunan sumber daya manusia, (5) pembangunan pedesaan.[7]

Bantuan keuangan yang dikeluarkan Uni Eropa melalui IPA ini sudah dilakukan dalam dua kali periode, yaitu IPA I dari tahun 2007-2013 dan IPA II dari tahun 2014-2020. Bantuan keuangan pada periode 1 yaitu IPA I, Uni Eropa telah menghabiskan dana sebesar 11.5 milyar Euro untuk kawasan Balkan Barat. Sedangkan di dalam IPA II, sampai

[6] *Ibid.,* hlm 80.
[7] *Ibid.,* hlm 82.

saat ini Uni Eropa telah menghabiskan dana sebesar 11.7 milyar Euro untuk kawasan Balkan Barat. Target dari IPA II sendiri berusaha untuk meng-*cover* seluruh sektor demokrasi dan pemerintahan, penegakan hukum, dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam memberikan bantuan keuangan tersebut, Uni Eropa melakukan *monitoring* dan evaluasi. Hal tersebut dilakukan oleh *Joint Monitoring Committees*, yang kemudian Komisi Eropa mengeluarkan *Annual Report on Pre-Accession Assistance* untuk mem-*publish* budget yang diimplementasikan per-tahunnya. Evaluasi mengenai program tersebut dinilai berdasarkan indikator yang terdapat di dalam *Strategy Papers and the Programmes*.

Implementasi bantuan keuangan IPA II di negara-negara kawasan Balkan Barat adalah sebagai berikut:

- **Albania**

  Alokasi dana yang diberikan Uni Eropa terhadap Albania untuk tahun 2014-2020 sebesar 649.4 juta Euro. Diimplementasikan untuk sektor (1) Demokrasi dan Pemerintahan: memperkuat institusi demokrasi, reformasi pelayanan sipil dan publik, memberdayakan *civil society*. (2) Penegakan Hukum dan Hak Dasar: pengadilan yang *independent* dan efisien, membantu kepolisian dalam memberantas

kejahatan yang terorganisir, melawan tindak korupsi, dan menghormati HAM.[8]

- **Bosnia-Herzegovina**

  Alokasi dana yang diberikan Uni Eropa terhadap Bosnia-Herzegovina untuk tahun 2014-2017 sebesar 165.8 juta Euro. Diimplementasikan untuk sektor (1) Demokrasi dan Pemerintahan: memperkuat institusi demokrasi dan reformasi pelayanan sipil. (2) Penegakan Hukum dan Hak Dasar: meningkatkan pengadilan yang adil, *independent*, akuntabilitas, dan efisien; melawan korupsi dan kejahatan yang terorganisir; dan melindungi hak dasar dan hak minoritas.

- **Kosovo**

  Alokasi dana yang diberikan Uni Eropa terhadap Kosovo untuk tahun 2014-2020 sebesar 645.5 juta Euro. Diimplementasikan untuk sektor (1) Demokrasi dan Pemerintahan: reformasi pelayanan sipil (akuntabilitas dan transparan), mendirikan institusi demokrasi dan memperkuat institusi demokrasi yang ada. (2) Penegakan Hukum dan Hak Dasar: melawan korupsi dan kejahatan terorganisir, mengimplementasikan hukum HAM, dan melindungi hak minoritas.

- **Macedonia**

  Alokasi dana yang diberikan Uni Eropa terhadap Macedonia untuk tahun 2014-2020 sebesar 664.2 juta Euro. Diimplementasikan untuk

[8] http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/albania_en diakses pada 28 Desember 2016 pukul 12.13 WIB.

sektor (1) Demokrasi dan Pemerintahan: reformasi pelayanan sipil (transparan, akuntabilitas, dan *independent*), mempromosikan sistem desentralisasi, mengimplementasikan Ohrid *Peace Agreement*, mendirikan institusi demokrasi, membentuk *strong civil society* untuk berkontribusi dalam *public debate* (ex: demokrasi, dan HAM). (2) Penegakan Hukum dan Hak Dasar: reformasi pengadilan, melawan tindak korupsi dengan lebih efektif, menghormati HAM (khususnya dalam kebebasan berekspresi, media, menghormati hak minoritas seperti LGBT dan Roma), dan melawan kejahatan terorganisir.

- **Montenegro**

  Alokasi dana yang diberikan Uni Eropa terhadap Montenegro untuk tahun 2014-2020 sebesar 270.5 juta Euro. Diimplementasikan untuk sektor (1) Demokrasi dan Pemerintahan: memperkuat institusi demokrasi dan reformasi pelayanan sipil. (2) Penegakan Hukum dan Hak Dasar: meningkatkan kerja pengadilan (*independent*, akuntabilitas, dan efisien), melawan korupsi dan kejahatan terorganisir, dan melindungi hak minoritas.

- **Serbia**

  Alokasi dana yang diberikan Uni Eropa terhadap Serbia untuk tahun 2014-2020 sebesar 1.5 milyar Euro. Diimplementasikan untuk sektor (1) Demokrasi dan Pemerintahan: agar administrasi publik lebih professional dan normalisasi hubungan dengan Kosovo. (2)

Penegakan Hukum dan Hak Dasar: agar pengadilan lebih *independent*, adil, dan professional; melawan korupsi dan kejahatan terorganisir, menghormati hak minoritas dan kebebasan berekspresi; dan meningkatkan *management* asilum.

Sebelum mengeluarkan kebijakan mengenai IPA, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan CARDS *Programme (Community Assistance for Reconstruction Development and Stabilization)* untuk negara-negara di kawasan Balkan Barat. Kebijakan ini adalah sebuah kebijakan untuk negara-negara di kawasan Balkan Barat sebagai *EU financial instrument*. Kebijakan CARDS ini dibuat pada tahun 2000-2006. Uni Eropa memiliki budget sebesar 4.65 milyar Euro untuk membantu dalam sektor (1) *justice and home affairs,* (2) *administrative capacity building*, (3) *economic and social development*, (4) *democratic stabilization*, (5) *environment and natural resources*.

Tabel 5: Bantuan Finansial Uni Eropa kepada Kawasan Balkan Barat dalam Kerangka CARDS *Programme* di tahun 2002-2004

CARDS Programme Allocation for 2002 - 2004 (million €)

	2002	2003	2004	TOTAL
Albania	44.9	46.5	58.5	149.9
Bosnia and Herzegovina	71.9	63.0	65.0	199.9
Croatia	59.0	62.0	76.0	197.0
The former Yugoslav Republic of Macedonia	41.5	43.5	51.0	136.0
Serbia and Montenegro[1]	359.6	331.28	297.0	987.88
Regional[2]	43.5	31.5	-	75.00
TOTAL	**620.4**	**577.78**	**547.5**	**1 745.68**

1) includes the Republic of Serbia, the Republic of Montenegro and the province of Kosovo, which is currently under UN administration
2) regional funds for Integrated Border Management are included in the country programmes.

- Tabel 6: Alokasi dana CARDS *Programme* untuk Albania

Albania Programme Allocation for 2002 - 2004 (million €)

Sector	2002	2003	2004	Total
JUSTICE & HOME AFFAIRS	21.0	20.0	34.0	75.0
ADMINISTRATIVE CAPACITY BUILDING	6.0	8.0	3.0	17.0
ECONOMIC & SOCIAL DEVELOPMENT	12.9	17.5	12.0	42.4
ENVIRONMENT, NATURAL RESOURCES	4.0	-	7.0	11.0
DEMOCRATIC STABILISATION	1.0	1.0	2.5	4.5
TOTAL ALLOCATION	**44.9**	**46.5**	**58.5**	**149.9**

- Tabel 7: Alokasi dana CARDS *Programme* untuk Bosnia-Herzegovina

Bosnia and Herzegovina Programme Allocation for 2002 - 2004 (million €)

Sector	2002	2003	2004	Total
JUSTICE & HOME AFFAIRS	16.5	18.0	23.5	58.0
ADMINISTRATIVE CAPACITY BUILDING	10.5	12.0	21.5	44.0
ECONOMIC & SOCIAL DEVELOPMENT	13.4	2.4	14.1	29.9
ENVIRONMENT, NATURAL RESOURCES	6.5	10.1	1.4	18.0
DEMOCRATIC STABILISATION	25.0	20.5	4.5	50.0
TOTAL ALLOCATION	**71.9**	**63.0**	**65.0**	**199.9**

- Tabel 8: Alokasi dana CARDS *Programme* untuk Kroasia

Croatia Programme Allocation for 2002 - 2004 (million €)

Sector	2002	2003	2004	Total
JUSTICE & HOME AFFAIRS	10.0	12.0	21.85	43.85
ADMINISTRATIVE CAPACITY BUILDING	12.0	11.8	15.1	38.9
ECONOMIC & SOCIAL DEVELOPMENT	18.0	17.5	17.75	53.25
ENVIRONMENT, NATURAL RESOURCES	3.0	3.7	3.8	10.5
DEMOCRATIC STABILISATION	16.0	17.0	17.5	50.5
TOTAL ALLOCATION	**59.0**	**62.0**	**76.0**	**197.0**

- Tabel 9: Alokasi dana CARDS *Programme* untuk Macedonia

The former Yugoslav Republic of Macedonia Programme Allocation for 2002 - 2004 (million €)

Sector	2002	2003	2004	Total
JUSTICE & HOME AFFAIRS	7.0	12.5	17.0	36.5
ADMINISTRATIVE CAPACITY BUILDING	14.0	9.0	8.5	31.5
ECONOMIC & SOCIAL DEVELOPMENT	11.5	11.0	14.0	36.5
ENVIRONMENT, NATURAL RESOURCES	-	1.0	2.0	3.0
DEMOCRATIC STABILISATION	3.0	3.0	3.0	9.0
OTHER	6.0	7.0	6.5	19.5
TOTAL ALLOCATION	**41.5**	**43.5**	**51.0**	**136.0**

- Tabel 10: Alokasi dana CARDS *Programme* untuk Serbia dan Montenegro

Serbia and Montenegro Programme Allocation for 2002 - 2004 (million €)

Sector	2002	2003	2004	Total
SERBIA				
INSTITUTION BUILDING	34.7	58.5	64.0	157.2
ECONOMIC RECONSTRUCTION	132.5	141.5	121.5	395.5
CIVIL SOCIETY	9.5	24.0	21.0	54.5
OTHER	13.0	16.0	11.5	40.5
MONTENEGRO				
INSTITUTION BUILDING	3.0	4.0	10.0	17.0
ECONOMIC RECONSTRUCTION	9.5	7.5	4.5	21.5
CIVIL SOCIETY	0.5	1.5	2.5	4.5
OTHER	2.0	2.0	2.0	6.0
KOSOVO				
INSTITUTION BUILDING	24.2	12.0	15.0	51.2
ECONOMIC RECONSTRUCTION	101.0	46.28	31.0	178.28
SOCIAL DEVELOPMENT AND CIVIL SOCIETY	9.8	5.0	4.0	18.8
OTHER	19.9	13.0	10.0	42.9
TOTAL ALLOCATION	**359.6**	**331.28**	**297.0**	**987.88**

B. IMPLEMENTASI *STABILIZATION AND ASSOCIATION PROCESS* (SAP) DI KAWASAN BALKAN BARAT

1. Melawan Korupsi

Dalam mengatasi melawan korupsi, secara keseluruhan Uni Eropa meluncurkan sebuah program yang dinamakan *Strengthening the Prosecutor's Network* yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama diantara para jaksa di kawasan Balkan Barat dan mendukung *joint*

investigations dalam kasus kejahatan internasional.[9] Uni Eropa menjadi satu-satunya aktor yang memiliki kontribusi paling besar dalam upaya melawan korupsi. Uni Eropa menjadi *single donor* dan agen internasional yang paling signifikan di kawasan ini.

Bagi Uni Eropa, dorongan untuk menurunkan tingkat korupsi di kawasan Balkan menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan karena korupsi akan berpengaruh dalam melemahkan penegakan hukum, berefek negatif dalam lingkungan bisnis, dan *national budgets* yang mempengaruhi pendidikan dan kesehatan masyarakat.

2. *Monitoring* dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu

Uni Eropa sebagai aktor eksternal memiliki peran yang sangat signifikan dalam memonitor *progress* penyelenggaraan pemilu di Balkan Barat. Pemilihan umum yang kompetitif dijadikan satu-satunya cara yang *legitimate* dalam pemerintahan di kawasan Balkan Barat.

Uni Eropa melakukan dua hal utama yaitu pertama, memonitor, melaporkan, menilai, dan membentuk cara pemilihan umum baik saat pemilihan maupun pasca pemilihan umum di semua negara-negara *post*-komunis di kawasan Balkan Barat. Kedua, Uni Eropa mempengaruhi *pre-electoral agenda*.[10] Dalam hal ini terdapat tekanan yang dilakukan aktor eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

[9] Commission, E, 2015, *Pamflet Instrument for Pre-Accession Assistance: An Investment in Public Rule of Law.* Europe: European Union.

[10] Anastasakis, O, 2013-2014, Election Consolidation in the Post-Communist Balkans: Progress and Obstacles, *Caucasus International University of Oxford, Vol 3, No 4, Winter*, hlm 20.

Selain itu, dalam proses *monitoring*, Uni Eropa melakukan *bilateral deadlocks* terhadap Balkan Barat.[11] Misalnya seperti *High Level Accession Dialogue* dengan Macedonia, *the Structured Dialogue on Justice* dengan Bosnia and Herzegovina, *the Structured Dialogue on the Rule of Law* dengan Kosovo, dan *the High Level Dialogue* dengan Albania. Dalam hal ini Uni Eropa juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi internasional seperti OSCE dan NGO.

Pemilihan umum Albania di tahun 2000 misalnya, OSCE (*Organisation for Security and Cooperation in Europe*), *Council of Europe*, dan Uni Eropa dalam praktek pemilu terdapat *electoral fraud*, *political violence*, dan korupsi.[12] Kemudian di tahun 2013, kemenangan Edi Rama dari Sali Berisha di Albania menunjukkan peningkatan yang positif dalam penyelenggraan pemilu. Ini memperkuat Albania untuk masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa. *Reform requirements* dan perubahan ke dalam *specific conditions* di kawasan Balkan Barat sangat bersandar kepada Uni Eropa.

3. Mendorong Terciptanya *Good Governance* dan *Rule of Law*

Mengkondisikan Balkan Barat untuk fokus kedalam peningkatan *good governance* dan *rule of law*. Pemerintahan harus berusaha menegakkan hukum dengan adil. Uni Eropa juga berusaha untuk mewujudkan

[11] Parliament, E, 2015, *The Western Balkans and EU Enlargement : Lesson Learned, Ways Forward, and Prospects Ahea,* Europe: Directorate-General for External Policies, hlm 13.

[12] Anastasakis, O, 2013-2014, Election Consolidation in the Post-Communist Balkans: Progress and Obstacles, *Caucasus International University of Oxford, Vol 3, No 4, Winter*, hlm 21.

transparansi di dalam pemerintahan. Hal ini dapat dilihat di Kroasia bahwa Kroasia bisa masuk ke dalam anggota Uni Eropa, karena dia berhasil menciptakan *rule of law* dan anti-korupsi. Kroasia berhasil dalam berfokus terhadap *judiciary, police, public prosecution*, dan peningkatan institusi publik. Dalam mendorong anti-korupsi di Kroasia, dia membentuk *Bureau for the Suppression of Corruption and Organised Crime* (USKOK).

Hal yang sama juga dapat dilihat di Kosovo. Uni Eropa membentuk EULEX (*European Union Rule of Law Mission to Kosovo*) dalam upayanya menegakkan hukum di Kosovo. Uni Eropa menghabiskan dana sebesar 2 milyar Euro dalam meluncurkan misi ini.

Di Albania juga dapat dilihat mengenai *rule of law* di Laut Adriatik. Program yang didukung oleh Uni Eropa dalam penegakan hukum di Laut Adriatik bernama *Support to Blue Border Management*. Terdapat *video monitoring* agar program yang dijalankan menjadi lebih efektif, misalnya dalam melawan *human trafficking* dan penyelundupan *illicit commodities*. Tentunya hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara-negara tetangga Albania dan *EU's market* dalam peningkatan *justice, freedom, and security*.

Di Macedonia terdapat *digital radio communication* yang bertujuan untuk mempermudah komunikasi bagi pihak kepolisian dan Kementrian Dalam Negeri. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan antarnegara-negara anggota Uni Eropa dalam bertukar informasi.

4. Meningkatkan Kapasitas Administrasi Publik dan *Civil Society*

Secara umum Uni Eropa melakukan beberapa hal dalam mendorong kapasitas administrasi publik dibawah IPA di kawasan Balkan Barat. Hal-hal tersebut adalah (1) *Technical Assistance* (TACSO) untuk inisiatif peningkatan kapasitas. (2) *People 2 People Programme* (P2P), sebuah program untuk datang ke insititusi-institusi Uni Eropa yang tujuannya untuk bertukar pengalaman, *transferring know-how*, dan *good practice*. (3) *Partnership Actions* yang bertujuan untuk memfasilitasi transfer ilmu dan realisasi *innovative cross-national project* antara CSOs dan dan Uni Eropa.

Kroasia juga mampu mendorong keterlibatan *civil society*. Salah satunya pemerintah Kroasia membentuk *Citizens Organize to Oversee Voting* (GONG), *Partnership for Development* (PSD), dan *Transparency International* (TI).[13]

Tabel 11: Jumlah *Civil Society Organisations* di Kawasan Balkan Barat sampai tahun 2009

Bosnia-Herzegovina	12,198	Estimated # of NGOs in 2008
Croatia	37,000	Estimated # of CSOs, including NGOs, sports and religious organisations, in 2009
FYR Macedonia	9,830	Registered citizens' associations and foundations, 2009
Kosovo	5,000	Estimated # of NGOs in 2009
Montenegro	4,500	Estimated # of NGOs in 2009
Serbia*	2,100	Estimated # of active NGOs in 2009

Source: USAID 2009 NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia.
** The European Commission's 2011 progress report on Serbia cites a total of 8,500 registered organisations.*

[13] Parliament, E, 2015, *The Western Balkans and EU Enlargement : Lesson Learned, Ways Forward, and Prospects Ahead,* Europe: Directorate-General for External Policies, hlm 18.

Implementasi ini dapat dilihat di Kosovo terdapat *Radio and Television of Kosovo* (RTK) yang menghabiskan dana sebesar 4 juta Euro dari bantuan Uni Eropa.[14] Hal ini dilakukan agar pelayanan publik dan media di Kosovo menjadi *independent* dari pihak manapun. Hal tersebut menjadi bagian untuk mendukung upaya demokrasi dan pluralisme di Kosovo.

Selain itu hal ini juga dapat dilihat di dalam meningkatkan profesionalitas *civil service*, Uni Eropa membangun *Regional School of Public Administration* (RESPA) untuk kawasan Balkan Barat. RESPA's *office* terdapat di Danilovgrad Montenegro.[15] Hal ini bertujuan untuk membangun kapasitas administrasi publik yang akuntabel, efektif, dan professional. RESPA berusaha mendorong terciptanya peningkatan administrasi publik dan sebagai tempat untuk berlatih dalam membangun birokrasi yang baik. Selain itu di Montenegro, Uni Eropa juga mendukung *gender equality*.[16] Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat 167 politikus wanita (anggota parlemen dan partai politik) yang sangat aktif dalam program pendidikan untuk meningkatkan *advocacy skills*. Program ini juga mampu memberikan hak quota kepada wanita sebesar 30% di dalam *Election Law*.

Di Serbia, Uni Eropa juga berusaha untuk membantu dalam *safeguarding public funds*. Dalam hal ini Uni Eropa mendorong *Serbia's State Audit Institution* untuk menilai legitimasi dan legalitas partai politik

---

[14] Union, E, 2004, *The European Union and Western Balkans : Building the Future Together.* Europe: European Communities, hlm 24.

[15] Commission, E, 2015, *Pamflet Instrument for Pre-Accession Assistance: An Investment in Public Administration Reform* . Europe: European Union.

[16] Commission, E, 2015, *Pamflet Instrument for Pre-Accession Assistance: An Investment in Public People* . Europe: European Union.

dan institusi publik dalam menggunakan *public funds.* *Serbia's State Audit Institution* juga melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada Parlemen Serbia. Selain itu, banyak sekali *micro-project* yang dilakukan dalam *issue* rasisme, kesetaraan gender, dan demokrasi.[17] Hal tersebut telah menghabiskan dana sebesar 31.000 Euro.

Di Bosnia-Herzegovina juga terjadi peningkatan kapasitas administrasi publik dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Di negara ini, terdapat sebuah *project* yaitu *Public Administration Reform: The Reinforcement of Local Democracy*, dimana program ini bertujuan untuk menguatkan kerjasama antara *local authorities* dan *citizens*.

5. Meningkatkan Tingkat Perekonomian

Di Bar dan Boka-Bay Montenegro dan di Dubrovnik Neretva Kroasia, terjadi peningkatan hasil produksi minyak zaitun dimana ini menjadikan hasil produksi lebih kompetitif. Hal ini membuat kesempatan ekonomi dan kesempatan untuk bekerja menjadi lebih luas. *Project* ini diimplementasikan oleh enam *local partners*. Hal ini juga mampu meningkatkan sektor *agrotourism* di kawasan ini. Promosi dan *marketing* yang dilakukan berfokus kepada *markets for nature* dan produk lokal asli.

[17] Union, E, 2004, *The European Union and Western Balkans : Building the Future Together.* Europe: European Communities, hlm 23.

6. Meningkatkan Kualitas SDM dan Sosial

Dalam meningkatkan kualitas SDM, Uni Eropa mengadakan program yaitu peningkatan kewirausahaan yang terdapat di Kosovo. Di Kosovo terdapat sebuah program yaitu *The Enterprise Growth Programme and Business Advisory* dimana di dalam program ini para wirausahawan baik yang kecil maupun besar dilatih untuk memimpin perusahaannya sendiri agar memiliki keahlian khusus di dalam manajemen industri. Dalam program ini diikuti oleh 86 wirausahawan tingkat kecil, 47 wirausaha wanita, 3 perusahaan yang memperoleh sertifikasi standar ISO, dan beberapa perusahaan lainnya yang menerima investasi keuangan.

Sedangkan di dalam peningkatan di bidang sosial, Uni Eropa menyediakan alternatif yang lebih baik bagi *refugee camps* pasca konflik Kosovo. Dalam hal ini, *refugee camps* menjadi lebih aman dan sehat. Kemudian para *residents* yang tinggal di sana, terdapat sekitar 200 *residents* telah bekerja secara temporer dan telah tersedia *vocational trainings* bagi lebih dari 230 *residents*. Malahan, sebagian dari mereka telah memulai untuk membangun bisnisnya sendiri.

Kondisi perekonomian kawasan Balkan Barat pasca runtuhnya komunisme Yugoslavia dan pada masa negara-negara tersebut memperoleh kemerdekannya adalah terjadi ketidakstabilan harga, pertumbuhan yang rendah, ketidakefisian mikro dan makro ekonomi, serta tingkat

penganggguran yang tinggi.[18] Penjelasan mengenai perekonomian dan upaya untuk mereformasi sistem ekonomi menjadi sistem ekonomi pasar-bebas di Balkan Barat, akan dijelaskan ke dalam BAB selanjutnya.

[18] Franičević, I. B, 2003, *Working Papers 033: Understanding Reform: the Case of Croatia,* Vienna: The wiiw Balkan Observatory, hlm 3.